



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

- Nama** : LENDEK JAYADI
- Jabatan** : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
- NHK** : 463307

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.300.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 1995 m²/52 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 800.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/36 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
- Tanah Seluas 400 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 7.500.000

- MOTOR, HONDA SPM R2 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 28.500.000

D. SURAT BERTAHAPAN Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.471.323

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.338.471.323

III. HUTANG Rp. 255.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.083.471.323

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.